



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban organisasi/instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pelaporan kinerja menjadi salah satu indikator terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel dimana dalam proses penyusunannya akan menunjukkan konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah gambaran capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2006-2021;

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

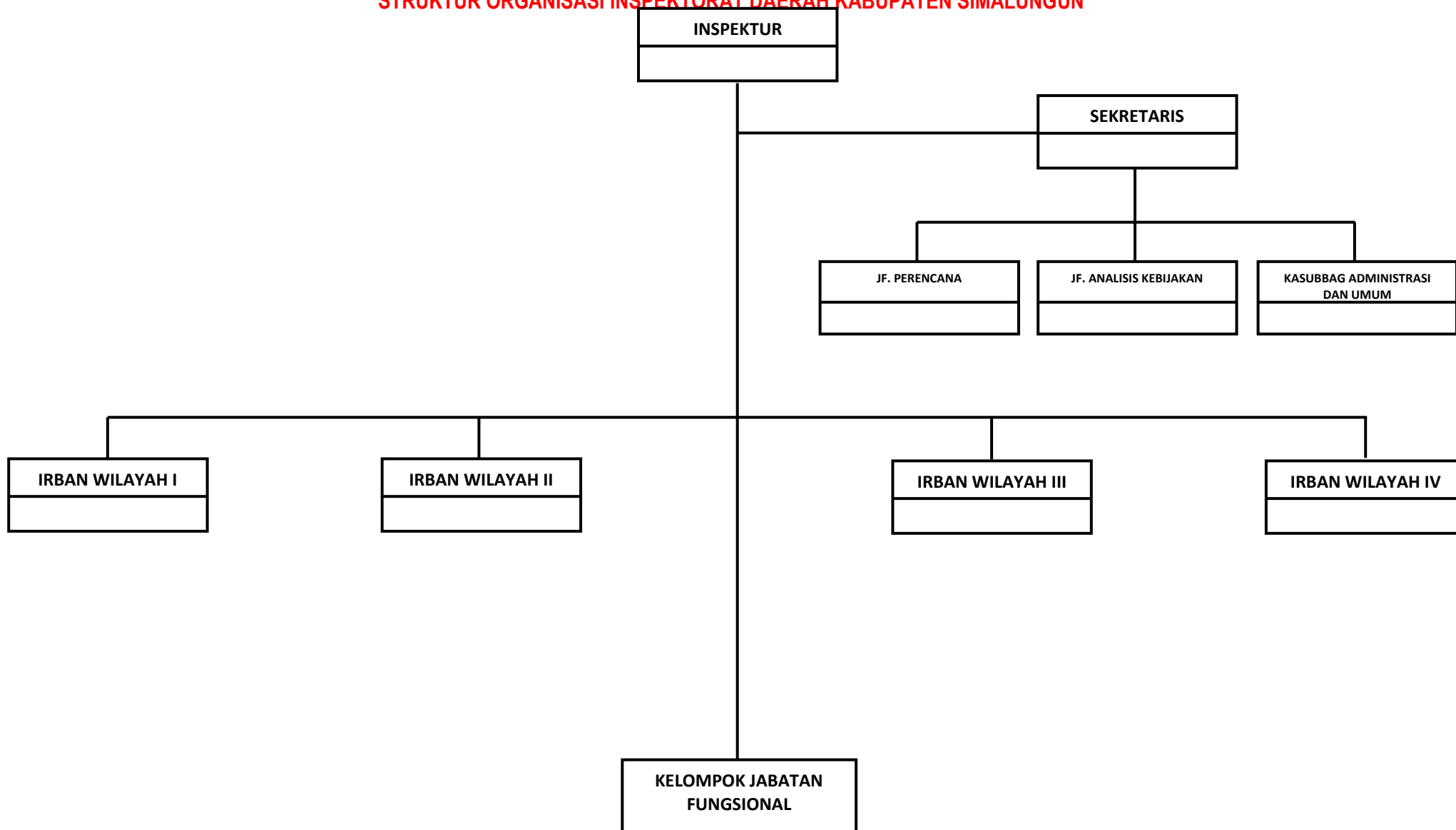
- a. Inspektur Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN





1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan;
- b. Merumuskan kebijakan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Inspektur Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- b. Merencanakan dan mengembangkan kepegawaian daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah Kabupaten dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;



- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan surat menyurat dan rumah tangga;

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional daerah;
- c. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsional Perencana mempunyai rincian tugas :

- a. Pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. Penyusunan anggaran Inspektorat Kabupaten;
- c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Fungsional Analisis Kebijakan mempunyai rincian tugas :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Pengadministrasian Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. Penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah I;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah II;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah III;



- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :

- a. Pengusulan program pengawasan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah IV;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Isu-isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun yang mengikuti diklat pengawasan, BinteK Operasional Pengawasan, dan BinteK SPIP.
- 2) Masih rendahnya tindak lanjut terhadap Hasil Evaluasi LAKIP
- 3) Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting
- 4) Masih rendahnya pengawasan pembinaan urusan Pemerintah Desa
- 5) Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan
- 6) Belum terlaksananya asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran
- 7) Belum optimalnya pengawasan pada program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan yang dilaksanakan di daerah (pemeriksaan Jampersal, BOS, DAK, Investigatif, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dll.
- 8) Belum optimalnya pemeriksaan pengelolaan dan asset daerah dan asset desa
- 9) Belum optimalnya pengimplementasian SPIP terintegrasi dan semua OPD
- 10) Perlunya peningkatan integritas Pemerintah Daerah melalui capaian nilai MCP, SPI, dan pencegahan & pemberantasan korupsi secara umum

1.6 Keadaan Pegawai

Susunan Kepegawaian :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Tabel 1
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	12
3	S1	30
4	D3	0
5	SLTA	1
	Jumlah	43

Sumber: DUK Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023

b. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 2
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Madya	1
2	Pembina TK. I	6
3	Pembina	5
4	Penata TK.I	1
5	Penata	13
6	Penata Muda TK. I	12
7	Penata Muda	1
8	Pengatur	-
9	Pengatur TK. I	1
10	Pengatur Muda	-
	Jumlah	38

Sumber: DUK Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Tabel 3
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II/b	1



2	Eselon III/a	6
3	Eselon III/b	-
4	Eselon IV/a	1
5	Fungsional	21
6	Staf	14

Sumber: DUK Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023

1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Aset (Sarana Prasarana)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun memiliki sarana dan prasarana yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian besar yaitu:

a. Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah

Tabel.3 Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah

No	Nama/ Jenis	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket.
		Kode Barang	Register				Hak	Tg l.	No.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor	01.01.11.04.01	0001	4,28 2	2000	Komp. SKPD Pam. Raya	Pakai	-	-	BPPT-PM	Pembe- lian	171,280,000.00	TANAH G8
Jumlah												171,280,000.00	

b. Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin

Tabel.4 Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Kondisi Barang	Harga	Pegguna	Ruangan	Ket.
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15			16
1	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	1,155,000.00	Kasubbag Evlap	Kasubbag Evlap	
2	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	1,155,000.00	Kasubbag Adm&Umu m	Kasubbag Adm&Umu m	
3	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	1,155,000.00	Kasubbag Perencanaa n	Kasubbag Perencanaan	
4	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	0001	Tasto		Campuran	2017						Pembelian	B	1,210,000.00	Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan	
5	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	0002	Tasto		Campuran	2017						Pembelian	B	1,210,000.00	Petugas Kebersihan	Petugas Kebersihan	
6	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktura l	0001	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
7	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktura l	0002	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	



		I																
8	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0003	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
9	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0004	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
10	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0005	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
11	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0006	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
12	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0007	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
13	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0008	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
14	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0009	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
15	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0010	RRC/Imp		Campuran	2017						Pembelian	B		Fungsional	Fungsional	



		Pegawai Non Struktural		ort											1,320,000.00	Umum	Umum	
16	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0011	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
17	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0012	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
18	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0013	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
19	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0014	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
20	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0015	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
21	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0016	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
22	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0017	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	



		I																
23	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0018	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
24	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0019	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
25	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0020	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
26	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0021	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
27	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0022	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
28	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0023	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
29	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0024	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
30	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0025	RRC/Imp		Campuran	2017						Pembelian	B		Fungsional	Fungsional	



		Pegawai Non Struktural		ort											1,320,000.00	Umum	Umum	
31	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0026	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
32	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0027	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
33	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0028	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
34	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0029	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
35	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0030	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
36	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0031	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
37	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0032	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	



		I																
38	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0033	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
39	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0034	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
40	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0035	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
41	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0036	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
42	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0037	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
43	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0038	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
44	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0039	RRC/Import		Campuran	2017						Pembelian	B	1,320,000.00	Fungsional Umum	Fungsional Umum	
45	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0040	RRC/Imp		Campuran	2017						Pembelian	B		Fungsional	Fungsional	



		Pegawai Non Struktural		ort											1,320,000.00	Umum	Umum	
46	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0021			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
47	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0022			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
48	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0023			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
49	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0024			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
50	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0025			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
51	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0026			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
52	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0027			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
53	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0028			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
54	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0029			Busa	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
55	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	0030			Campuran	2017						Pembelian	B	1,355,750.00	BPK	BPK	
56	02.07.01.01.52	Unintem uptible Power Supply (UPS)	0002	Prolink		Campuran	2017	538701 164701 076					Pembelian	B	1,375,000.00	Irban Wil-I	Irban Wil-I	
57	02.07.01.01.52	Unintem uptible Power Supply (UPS)	0003	Prolink		Campuran	2017	538701 164701 022					Pembelian	B	1,375,000.00	Irban Wil-II	Irban Wil-II	
58	02.07.01.01.52	Unintem uptible Power Supply	0004	Prolink		Campuran	2017	538701 164701 053					Pembelian	B	1,375,000.00	Irban Wil-III	Irban Wil-III	



		(UPS)															
59	02.07.01.01.52	Unintem uptible Power Supply (UPS)	0005	Prolink		Campuran	2017	538701 164701 054					Pembelian	B	1,375,000.00	Irban Wil- IV	Irban Wil-IV
60	02.06.03.04.08	Printer	0005	Epson		Fiber	2016	UE8K0 15459					Pembelian	B	3,987,500.00	Irban-I	Irban-Idan II
61	02.06.03.04.08	Printer	0006	Epson		Fiber	2016	UE8K0 13384					Pembelian	B	3,987,500.00	Irban-II	Irban I dan II
62	02.06.03.04.08	Printer	0007	Epson		Fiber	2016	UE8K0 18023					Pembelian	B	3,987,500.00	Irban-III	Irban III dan IV
63	02.06.03.04.08	Printer	0008	Epson		Fiber	2016	UE8K0 16621					Pembelian	B	3,987,500.00	Irban-IV	Irban III dan IV
64	02.06.03.04.08	Printer	0012	Canon		Campuran	2017	NJXA3 17970					Pembelian	B	1,397,000.00	Bend. Pengeluaran	Bend. Pengeluaran
65	02.06.03.04.08	Printer	0013	Canon		Campuran	2017	NBHA2 56815					Pembelian	B	1,397,000.00	Sekretariat	Sekretariat
66	02.06.03.04.08	Printer	0014	Canon		Campuran	2017	NBHA2 56842					Pembelian	B	1,397,000.00	Irban Wilayah-III	Irban Wilayah- III
67	02.06.03.04.08	Printer	0015	Canon		Campuran	2017	NJXA3 18319					Pembelian	B	1,397,000.00	Auditor	Auditor
68	02.06.03.04.08	Printer	0016	Epson		Fiber	2020	X4EZ00 4693					Pembelian	B	5,000,000.00	Irban-III	Irban Wilayah- III
69	02.06.03.04.08	Printer	0017	Epson		Fiber	2020	x4EZ00 5311					Pembelian	B	5,000,000.00	Irban-II	Irban Wilayah- II
70	02.06.03.04.08	Printer	0018	Epson		Fiber	2020	X4EZ00 6617					Pembelian	B	5,000,000.00	Irban-IV	Irban Wilayah- IV
71	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0001			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	Irban Wilayah-I	Irban Wilayah- I
72	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0002			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	Irban Wilayah-II	Irban Wilayah- II
73	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0003			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	Irban Wilayah-III	Irban Wilayah- III



74	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0004			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	Irban Wilayah-IV	Irban Wilayah-IV	
75	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0005			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	BPK	BPK	
76	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	0006			Campuran	2017						Pembelian	B	1,512,500.00	BPK	BPK	
77	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0006	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00	Sekretaris	Sekretaris	
78	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0007	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00	Irban Wil-I	Irban Wil-I	
79	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0008	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00	Irban Wil-II	Irban Wil-II	
80	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0009	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00	Irban Wil-III	Irban Wil-III	
81	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0010	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00	Irban Wil-IV	Irban Wil-IV	
82	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Eselon III	0011	RRC/Imp ort		Campuran	2017						Pembelian	B	1,518,000.00			
83	02.06.02.01.02	Rak Kayu	0001	Astro B0		Campuran	2017						Pembelian	B	1,760,000.00	Inspektur	Inspektur	
84	02.06.02.01.02	Rak Kayu	0002	Tempah an		Campuran	2017						Pembelian	B	2,090,000.00	Inspektur & Sekretariat	Inspektur & Sekretariat	
85	02.06.02.01.02	Rak Kayu	0003	Tempah an		Campuran	2017						Pembelian	B	2,090,000.00	Irban I dan Irban II	Irban I dan Irban II	
86	02.06.02.01.02	Rak Kayu	0004	Tempah an		Campuran	2017						Pembelian	B	2,090,000.00	Irban III dan Irban IV	Irban III dan Irban IV	



87	02.06.02.01.02	Rak Kayu	0005	Tempahan		Campuran	2017						Pembelian	B	2,090,000.00	BPKP	BPKP	
88	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Eselon II	0002			Busa	2016						Pembelian	B	2,178,000.00	Inspektur	Inspektur	
89	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
90	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
91	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0003	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
92	02.06.04.07.06	Lemari Arsip 2 Pintu	0001	Mustang		Besi	2016						Pembelian	B	2,200,000.00	Bend. Pengeluaran	Bend. Pengeluaran	
93	02.06.04.07.06	Lemari Arsip 3 Pintu	0012	Mustang		Besi	2016						Pembelian	B	4,950,000.00	Kasubbag Evlap	Sekretariat	
94	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0002	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	
95	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0003	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
96	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0004	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
97	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	0005	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B		Sekretariat	Sekretariat	



		untuk arsip Dinamis													2,200,000.00			
98	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0006	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
99	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0007	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
100	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0008	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Irban Wil-I	Irban Wil-I	
101	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0009	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Irban Wil-II	Irban Wil-II	
102	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0010	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Irban Wil- III	Irban Wil-III	
103	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0011	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,200,000.00	Irban Wil- IV	Irban Wil-IV	
104	02.06.01.04.04	Filling Besi/Met al	0026	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
105	02.06.01.04.04	Filling Besi/Met al	0027	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
106	02.06.01.04.04	Filling Besi/Met al	0028	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			



107	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0029	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
108	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0030	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
109	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0031	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
110	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0032	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
111	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0033	Mustang		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00			
112	02.06.02.06.39	Dispencer	0001	Polytron		Campuran	2017						Pembelian	B	2,530,000.00	BPK	BPK	
113	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00	Sekretaris	Sekretaris	
114	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0002	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00	Irban Wil-I	Irban Wil-I	
115	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0003	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00	Irban Wil-II	Irban Wil-II	
116	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0004	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00	Irban Wil-III	Irban Wil-III	
117	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0005	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00	Irban Wil-IV	Irban Wil-IV	



118	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0006	Expo		Campuran	2017						Pembelian	B	2,794,000.00			
119	02.06.01.04.14	Lemari Kayu	0013	Panel		Kayu	2011						Pembelian	B	3,000,000.00	Lemari Kayu Eselon II	Inspektur	
120	02.06.02.04.03	AC Unit	0001	LG		Campuran	2017						Pembelian	B	3,850,000.00	Inspektur	Inspektur	
121	02.06.04.01.04	Meja Kerja Eselon II	0002			Kayu	2016						Pembelian	B	5,115,000.00	Inspektur	Inspektur	
122	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	0001	Acer		Campuran	2017						Pembelian	B	5,197,500.00	Inspektorat	Inspektorat	
123	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001			Kayu	2016						Pembelian	B	5,390,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
124	02.06.04.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	0001	Vivo		Busa	2017						Pembelian	B	8,250,000.00	Inspektur	Inspektur	
125	02.06.04.06.05	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0001	Siantano		Busa	2017						Pembelian	B	5,720,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
126	02.06.04.06.05	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0002	Siantano		Busa	2017						Pembelian	B	5,720,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
127	02.06.02.06.03	Televisi	0001	Samsung		Campuran	2017	BN69-12486E-00					Pembelian	B	5,940,000.00	Inspektur	Inspektur	
128	02.06.03.02.02	Lap Top	0004	Acer		Campuran	2017	NXMXK SN008 607009					Pembelian	B	7,480,000.00	Sekretariat	Sekretariat	



								353400										
129	02.06.03.02.02	Lap Top	0005	Acer		Campuran	2017	NXMXK SN008 60700A 8C3400					Pembelian	B	7,480,000.00	MERI F.DAMANIK, SE	MERI F.DAMANIK, SE	
130	02.06.03.02.02	Lap Top	0006	Lenovo		Campuran	2017	PF0TW TW3					Pembelian	B	8,013,659.07	HELMIATI,S H	HELMIATI,SH	
131	02.06.03.02.02	Lap Top	0007	Lenovo		Campuran	2017	PF0TXF 8V					Pembelian	B	8,013,659.07	BERNANDO SILAEN,ST. M.Si	BERNANDO SILAEN,ST.M.Si	
132	02.06.03.02.02	Lap Top	0008	Lenovo		Campuran	2017	PF0TX F6Z					Pembelian	B	8,013,659.07	JUDITH YRS SIALLAGAN, SE.M.Si,Ak	JUDITH YRS SIALLAGAN,SE. M.Si,Ak	
133	02.06.03.02.02	Lap Top	0009	Lenovo		Campuran	2017	PF0TW Y78					Pembelian	B	8,013,659.07	ALFRETTY BUTAR- BUTAR,SH	ALFRETTY BUTAR- BUTAR,SH	
134	02.06.03.02.02	Lap Top	0010	Lenovo		Campuran	2017	PF0TXF 77					Pembelian	B	8,013,659.07	Drs>RASIT UA TAMBA,MM	Drs>RASITUA TAMBA,MM	
135	02.06.03.02.02	Lap Top	0011	Lenovo		Campuran	2017	PF0TW Y74					Pembelian	B	8,013,659.07	LORBERLIN PURBA,SE.M M	LORBERLIN PURBA,SE.MM	
136	02.06.03.02.02	Lap Top	0012	Acer		Campuran	2020	2S00G 13					Pembelian	B	9,000,000.00	LINCE SITORUS, SH	LINCE SITORUS, SH	
137	02.06.03.02.02	Lap Top	0013	Acer		Campuran	2020	JQPOG 13					Pembelian	B	9,000,000.00	MARTHA SILALAH	MARTHA SILALAH	
138	02.06.03.02.02	Lap Top	0014	Acer		Campuran	2020	9ZFOG 13					Pembelian	B	9,000,000.00	ANDRE S. GARINGGIN G,SH	ANDRE S. GARINGGING,S H	
139	02.06.02.03.01	Vakum/P enghisap Debu	0001	Forbes		Fiber	2016	154740 095944					Pembelian	B	8,399,000.00	Sekretariat	Sekretariat	
140	02.06.03.02.01	P.C Unit	0005	Lenovo		Fiber	2016	A10510 - 231SH-					Pembelian	B	16,695,000.00	Irban- I	Irban I dan II	



							841D- MP.153 64W										
141	02.06.03.02.01	P.C Unit	0006	Lenovo		Fiber	2016	A10510 - 231SH- 841D- MP.153 HHD					Pembelian	B	16,695,000.00	Irban-II	Irban I dan II
142	02.06.03.02.01	P.C Unit	0007	Lenovo		Fiber	2016	410- 510- 231SH- 841D- MP.153 8B02J					Pembelian	B	16,695,000.00	Irban-III	Irban III dan IV
143	02.06.03.02.01	P.C Unit	0008	Lenovo		Fiber	2016	A10510 - 231SH- 841D- MP.153					Pembelian	B	16,695,000.00	Irban-IV	Irban III dan IV
144	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0013	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 RZL					Pembelian	B	11,542,724.27	Sekretariat	Sekretariat
145	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0014	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 RZK					Pembelian	B	11,542,724.27	Irban Wilayah-I	Irban Wilayah- I
146	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0015	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 SP6					Pembelian	B	11,542,724.27	Auditor	Auditor
147	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0016	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 SP4					Pembelian	B	11,542,724.27	Irban Wilayah-II	Irban Wilayah- II
148	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0017	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 SSS					Pembelian	B	11,542,724.27	Irban Wilayah-III	Irban Wilayah- III
149	02.06.03.02.01	P.C. Unit	0018	Lenovo		Campuran	2017	S1H04 SNY					Pembelian	B	11,542,724.27	Irban Wilayah-IV	Irban Wilayah- IV
150	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0002			Kayu	2017						Pembelian	B	13,557,500.00	BPK	BPK
151	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda Beat		Campuran	2017						Pembelian	B	15,242,774.00	Inspektorat	Inspektorat
152	02.06.03.04.10	Scanner	0001	Canon		Campuran	2017	GX440 329					Pembelian	B	16,830,000.00	Sektrariat	Sektrariat



153	02.02.03.04.02	Portable Generati ng Set	0002			Campuran	2017					Pembelian	B	29,975,000.00	Inspektorat	InspektorT		
154	02.03.01.01.04	Kendera an Dinas Bermoto r Pejabat Eselon III	0002	Toyota / Innova V		Besi	2011			BK 978 T		Pembelian	B	270,856,500.00	Kendaraan Dinas Esel. III	Sekretaris		
155	02.03.01.01.04	Kendera an Dinas Bermoto r	0004	Rush		Besi	2010		MHFE2C- J3J7K004 845/DAE 1300	BK 1186 T		Pembelian	B	174,037,000.00	Kendaraan Dinas Essl.III	Irban Wil-I	MUTASI DARI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	
156	02.03.01.01.04	Kendera an Dinas Bermoto r	0005	Innova G		Besi	2007		MHFXW4 2G4A217 8258/1TR- 7036647	BK 1251 T		Pembelian	B	279,399,000.00	Kendaraan Dinas Essl.III	Irban Wil-II	MUTASI DARI SEKRETARIAT DPRD	
157	02.03.01.01.04	Kendera an Dinas Bermoto r	0006	Terrios		Besi	2007		MHFXW4 2GXA217 7843/1TR -7027232	BK 1171 T		Pembelian	B	194,860,300.00	Kendaraan Dinas Essl.III	Irban Wil-III	MUTASI DARI SEKRETARIAT DPRD	
158	02.03.01.01.04	Kendera an Dinas Bermoto r	0007	Innova G		Besi	2010		MHFXW4 2GXA217 7843/1TR -7027232	BK 1252 T		Pembelian	B	281,808,000.00	Kendaraan Dinas Essl.III	Irban Wil-IV	MUTASI DARI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
159	02.03.01.02.04	Mini Bus (Penump ang 14 Orang kebawah)	0052	Toyota / Kijang Innova		Besi	2013		MHFXW4 2G8D225 2091	1TR- 751160 2	BK 1300 T		Pembelian	B	269,679,900.00	Kendaraan Eselon II	Inspektur	Mutasi Dari Sekretariat Daerah
														2,048,951,274.00				



c. Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Gedung dan Bangunan

Tabel.5 Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Gedung dan Bangunan

No	Nama/Jenis Barang	Nimor		Kondisi Bangunan (B, KB,RB)			Luas Lantai (M2)	Letak/Lo kasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Ket.
		Kode Barang	Nomor Register		Bertingkat Tdk	Beton Tdk			Tanggal	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0001			Beton		Pematang Raya	28-06-05		5864			Pembelian	4,183,666,472.50	Banguan G8
2	TUGU/TANDA BATAS LAIN-LAIN	03.12.06.01.10	0001			Beton		Pematang Raya	30/12/2013					Pembelian	168,300,000.00	Pagar G-8
3	GEDUNG POS JAGA PERMANEN	03.11.01.13.01	0001			Beton		Pematang Raya	03-07-05					Pembelian	76,342,684.40	Pos Jaga G-8
JUMLAH															4,428,309,156.90	

d. Kartu Inventaris Barang (KIB-E) Aset Tetap Lainnya

Tabel.6

Kartu Inventaris Barang (KIB-E) Aset Tetap Lainnya

No	Nama/Jenis Barang	Kode Barang Perubahan	Nimor		Buku Perpustakaan		Barang Bercorak			Hewan Ternak		Jumlah	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Ket.
			Kode	Nomor Register	Judul Pencipta	Spesifikasi	Asal	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					



			Barang				Daerah									
1	2		3	4	6	7		10	11			13	14	15	16	17
1	Jaringan distribusi lain-lain	04.16.02.02.04													4,276,500	1
JUMLAH															4,276,500	



Inspektorat Kabupaten Simalungun.

1.8 Dukungan Dana

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 berasal dari APBD. Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Kab.Simalungun memiliki 3 Program, 10 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.637.164.274,- (Sepuluh Milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta serratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) Adapun anggaran Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		8.188.230.234,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.256.000,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	5.628.000,00
02	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	APBD	5.628.000,00
	Administrasi Keuangan Daerah		3.793.855.173,00
03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	3.870.736.704,00
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD	5.754.000,00
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	APBD	5.880.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		934.401.230,00
06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APBD	934.401.230,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.305.853.300,00
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	APBD	61.988.900,00
08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	727.837.500,00
09	Penyediaan peralatan rumah tangga	APBD	74.007.400,00
10	Penyediaan Bahan Logistik kantor	APBD	139.507.500,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	48.520.600,00
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	APBD	5.000.000,00
13	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	1.633.760.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		205.600.000,00
14	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	APBD	70.000.000,00
15	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	APBD	115.200.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		498.850.000,00
16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan,	APBD	265.380.000,00
17	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau gedung bangunan lainnya	APBD	195.000.000,00



	18	pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung bangunan lainnya	APBD	24.000.000,00
02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			1.063.020.918,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.285.166.000,00
	19	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	APBD	25.569.000,00
	20	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD	0
	21	Reviu Laporan Kinerja	APBD	0
	22	Reviu Laporan Keuangan	APBD	9.900.000
	23	Pengawasan Desa	APBD	439.178.000,00
	24	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	APBD	472.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu			218.000.000,00
	25	Pengawasan dengan tujuan tertentu	APBD	218.000.000,00
03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi			1.284.287.040,00
	Pendampingan dan Asistensi			
	26	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintah Daerah	APBD	340.878.000,00
	27	Pendampingan Asistensi, Verifikasi Reformasi Birokrasi	APBD	100.000.000,00
	28	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	APBD	843.409.040,00
J U M L A H				10.637.164.274,00

1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat, potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat dan Sistematika penulisan LKIP.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya. dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang belum ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab.Simalungun

a. Maksud :

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Simalungun dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

b.Tujuan :

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

-. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Simalungun merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Ketiga (3), yaitu: “**Penerapan GCG (Good and Clean Government)**”

c. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan dengan indikator sasaran “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti”.



2. Meningkatnya pengendalian internal dengan indikator sasaran “Score maturitas SPIP”.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran “Level Kapabilitas APIP”.
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan dengan indikator sasaran “Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti”.

**Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan**

VISI : Tekad agar Rakyat Hidup Sejahtera						
MISI III : Penerapan GCG (Good and Clean Government)						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Penerapan prinsip2 GCG: Adil, Mandiri, Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Transparan	1	Koordinasi, Monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi	1	Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	1	Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					2	Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas
					3	Melakukan verifikasi LHKPN/LHKASN.
Maksimalisasi peran Inspektorat Daerah (sebagai “mata dan telinga” kepala daerah) dengan menambah jumlah aparat dan mutu pengawasan)	1	Meningkatnya penyelesaian hasil Pemeriksaan	1	Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.	1	Melakukan Audit Kinerja
					2	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
					3	Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
					4	Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
	2	Meningkatnya pengendalian internal	2	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	1	Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
					2	Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
					3	Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah



	3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	3	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola
	4	Meningkatnya pengelolaan pengaduan	4	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	4	Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 bahwa perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 telah membuat Perjanjian Kinerja dengan Bupati Simalungun untuk mewujudkan target kinerja (secara lengkap termuat pada Lampiran 1).

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Simalungun tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut .:



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indeks Manajemen Resiko	Level Manajemen Resiko	Level 3
2.	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Dalam rencana kerja program dan Kegiatan Tahun anggaran 2023 terdapat kegiatan pengawasan internal untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di daerah Kabupaten Simalungun.

Kegiatan tersebut memiliki sasaran kegiatan (Output) tersedianya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Intern yang diterbitkan tersedianya secara tepat waktu dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Beberapa Dokumen hasil dari Pengawasan Internal yaitu :

Jenis Laporan	Target
C. Laporan Pelaksanaan Audit - Laporan Dana Desa - Laporan BUMNAG	
B. Review - Review Laporan Keuangan Tahunan - Review LPPD - Review Renja - Review RKPD - Review DAK - Review SSH/ASB - Review RKA/DPA	32 laporan 64 laporan 64 laporan 64 laporan 1 Laporan 1 Laporan
C. Evaluasi - SAKIP - PPBR	32 Laporan 32 Laporan
D. Pemantauan - Tindak Lanjut Temuan BPK - Tindak Lanjut Temuan APIP - LHKPN - Pengendalian Gratifikasi - Pengendalian Saber Pungli	80 % 80 % 100% 32 Laporan
E. Pengawasan Lainnya - Konsultasi	32 Laporan



Sementara itu untuk sasaran yang bersifat outcome dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Kapasitas Kemandirian Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kapabilitas APIP	- Level 3
	Indeks Manajemen Resiko	- Level 3

Untuk mencapai target tersebut pada ke empat Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan Upaya sebagai berikut :

1. Kapabilitas APIP dengan target level 3

Upaya yang dilakukan inspektorat Kab. Simalungun untuk mencapai target adalah

1. Peningkatan SDM APIP Melalui Diklat-diklat, Bimbingan Teknis dan e-learning yang telah dikembangkan oleh BPKP
2. Penyiapan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Berkelas Dunia
3. Peningkatan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia.
4. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM)
5. Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.
6. Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*.

2. Indeks Manajemen Resiko dengan target level 3

Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Simalungun adalah melakukan Pendampingan terhadap OPD-OPD dalam melakukan Penyusunan manajemen resiko.

1. Melakukan Kegiatan penjaminan atas proses manajemen resiko
2. Melakukan kegiatan penjaminan bahwa resiko telah dievaluasi dengan benar
3. Mengevaluasi Proses manajemen resiko
4. Mengevaluasi pelaporan resiko utama
5. Mereviu pengelolaan resiko utama



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Esensi pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis kinerja berorientasi mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* khususnya yang terkait dengan akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi target kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 yang telah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan akumulasi dari program dan kegiatan masing-masing bagian dan sekretariat Inspektorat Kabupaten Simalungun. Pengukuran kinerja mencakup seluruh indikator sasaran sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 dan dievaluasi untuk mengukur capaian kinerja masing-masing capaian sasaran strategis.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pelaporan pencapaian kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang



Pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Simalungun telah melaksanakan sebahagian program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Simalungun tahun 2023 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Simalungun 2021-2026 terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan:

Selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*), dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian terhadap target Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan								
	- Inspektorat Kabupaten	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	- Inspektorat Provinsi	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	- BPK-RI	%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Level kapabilitas APIP	angka	2	2	3	3	4	4	4
4	Indeks Manajemen Resiko	level	2	2	3	3	4	4	4



A. Capaian Indikator Kinerja Utama / Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023					
				Semester I			Semester II		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan								
	- Inspektorat Kabupaten	%	80%	80%	-	-	80%	-	-
	- Inspektorat Provinsi	%	80%	80%			80%		
	- BPK-RI	%	80%	80%	75.77%	94.62%	80%	78.77%	98.46%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
3	Level kapabilitas APIP	angka	3	3	1	33.33%	3	1	33.33%
4	Indeks Manajemen Resiko	level	3	3	sedang proses	sedang proses	3	sedang proses	sedang proses

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama,

Target Meningkatnya penyelesaian Hasil Pemeriksaan yang ditetapkan adalah 80 % realisasinya sebesar 78,77% dengan capaian kinerja sebesar 98,46% (Baik) dengan total jumlah seluruh rekomendasi sebanyak 48, yang telah mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut selesai sebesar 5 rekomendasi. Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.



Pencapaian **Sasaran Strategis Kedua**, Meningkatnya Kapabilitas APIP yang diukur dengan Jumlah APIP yang mengikuti Pengembangan SDM melalui Diklat/Pelatihan dan Jumlah Auditor yang bertambah. Sampai saat ini jumlah APIP yang mengikuti diklat untuk pengembangan kompetensi APIP telah tercapai sebanyak 30 APIP dan Jumlah Auditor yang bertambah sebanyak 9 orang melalui Pembentukan Auditor Muda yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP Prov.Sumatera Utara di Medan. Tetapi msh belum mencapai target penambahan auditor sebanyak 20 orang. Level Kapabilitas APIP yang diukur dengan target level 2 pada tahun anggaran 2023 Level Kapabilitas APIP berada di Level 1 .

Faktor Penghambat belum tercapainya Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah auditor hanya 20 Orang atau 25% dari jumlah auditor yang direkomendasikan dalam Surat Kepala BPKP nomor S-95/K/JF/2021 tanggal 25 Januari 2021 sebanyak 80 auditor
2. Belum Menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
3. Belum Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Resiko

Upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan Kapabilitas APIP adalah :

1. Memberikan tambahan Auditor atau SDM yang dapat dididik dan dilatih menjadi Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun secara berkala sehingga tercapai jumlah auditor ideal 80 Orang
2. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Simalungun untuk :
 - Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) di Tahun 2024
 - Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Resiko di Tahun 2024

Dalam Upaya Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merealisasikan Perencanaan dan Penganggaran dalam APBD Kabupaten Simalungun melalui :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan : Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian **Sasaran Strategis Ketiga**, Indeks Manajemen Resiko dengan Target yang ditetapkan Level 3 dengan realisasi Level 2 salah satunya dikarenakan SDM APIP yang belum optimal, baik aspek kompetensi maupun integritasnya, masih kurangnya pemahaman APIP dalam Pendampingan Pengelolaan manajemen resiko, maka wajar jika SDM APIP harus diberikan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan penguatan kemampuan SDM nya dalam pendampingan dan pengawasan. Demikian pula revitalisasi aspek dukungan informasi dan teknologi yang belum optimal



mengakibatkan data-data pengawasan internal seperti misalnya data tindak lanjut, temuan dan saldo temuan tidak terkelola dengan baik.

Faktor Penghambat belum tercapainya Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya APIP dalam memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan manajemen resiko
2. Kurangnya Auditor yang Profesional dan kompeten

Dalam Upaya Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Indeks manajemen Resiko (MR) Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merealisasikan Perencanaan dan Penganggaran dalam APBD Kabupaten Simalungun melalui :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Program : Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

C. Analisa Capaian Kinerja / Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) sasaran. Tahun 2023 adalah tahun **Kedua** pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, dari sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:



3.1.3 Evaluasi Kinerja

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perbandingan capaian kinerja					
				Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan								
	- Inspektorat Kabupaten	%	80%	80%	-	-	80%	-	-
	- Inspektorat Provinsi	%	80%	80%	60.00%	75 %	80%	58.31%	72.88%
	- BPK-RI	%	80%	80%	79.05%	98 %	80%	78.77%	97.33%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
3	Level kapabilitas APIP	angka	3	3	2	66 %	3	1	33.33%
4	Indeks Manajemen Resiko	level	3	3	-	-	3	sedang proses	sedang proses

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun lalu terlihat bahwa ada indikator mengalami Capaian Kinerja yang menurun yaitu Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dari 75% menjadi 72,88% dan juga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dari 79,05 % menjadi 78,77%, Opini BPK tetap dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Level Kapabilitas APIP yang menurun dari Level 2 menjadi Level 1, sedangkan Indeks Manajemen Resiko masih dalam Proses karena APIP belum melakukan Pendampingan dalam penyusunan Risk Register (RR) Manajemen Resiko.

target yang tidak tercapai dipengaruhi beberapa alasan

- b. Masih kurangnya jumlah auditor dibandingkan dengan luasnya jumlah objek pengawasan
- c. Kurangnya sumber daya aparatur berupa auditor dengan keterampilan teknis khusus seperti teknik sipil, arsitektur dan akuntansi serta sarana prasarana yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu kompleks terutama untuk pengawasan bidang keuangan dan infrastruktur. Jumlah auditor yang ada pada saat ini sebanyak 15 auditor dan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang optimal masih diperlukan sebanyak 60 auditor.



Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan untuk mencapai tingkat berikutnya terkait perwujudan peran APIP yang efektif yaitu melalui :

- a) Membuat usulan untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya.
- b) Membuat usulan penambahan SDM pengawas dan aparat pengawas berdasarkan Analisis Kebutuhan SDM Pengawas

Tabel 3. 2
Target Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2023

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>persentase</i>
Meningkatnya pengendalian internal	- Indeks Manajemen Resiko	- Level 3	Sedang proses	-
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	- Level 3	Level 1	33 %

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan yaitu Indeks Manajemen Resiko masih tahap proses dari Target akhir Tahun Perencanaan Level 3. Selanjutnya Level Kapabilitas APIP yang masih rendah dari Target akhir tahun Perencanaan. Oleh karena itu, pada tahun akhir perencanaan nanti diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun dapat lebih meningkatkan lagi kinerjanya guna terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dan efektif di daerah Kabupaten Simalungun.

Langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerja:

1. Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting;
2. Meningkatkan kualitas SDM APIP
3. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Inspektorat Daerah
4. Meningkatkan jumlah capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).



B. Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Kab.Simalungun Tahun 2023

1. Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sebesar Rp. 10.637.164.274,- dengan realisasi sebesar Rp.10.280.232.188,- atau 96,64%.

2. Capaian kinerja keuangan pendukung sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi keuangan dalam rangka mendukung sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Keuangan Pendukung Sasaran Strategis

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.188.230.234	7.998.842.802	97,69 %
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.164.647.000,-	879.245.918,-	92,88 %
3	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.284.287.040,-	1.218.368.468,-	94,86 %
Jumlah		10.637.164.274,-	10.280.232.188,-	96,64 %

C. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Pencapaian IKU

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan			
	- Inspektorat Kabupaten	472.000.000	433.830.900	91,91%
	- Inspektorat Provinsi			
	- BPK-RI			



Inspektorat Kabupaten Simalungun.

2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	472.000.000	433.830.900	91,91%
3	Level kapabilitas APIP	934.401.230	850.531.870	91,02 %
4	Indeks Manajemen Resiko	340.878.000	335.790.000	98.51%



Inspektorat Kabupaten Simalungun.

BAB IV P E N U T U P

Laporan kinerja menggambarkan kinerja SAKIP dari setiap instansi pemerintah yang berorientasi pada manajemen pembangunan berbasis kinerja. Sebagai media pertanggungjawaban Laporan Kinerja mendorong akuntabilitas publik melalui pelaporan dan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 melaporkan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dalam Indikator Kinerja yang dikuatkan dengan data pendukung. Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis secara umum telah mencapai target, walaupun masih memerlukan perbaikan tidak hanya dalam peningkatan kinerja juga terkait dengan perbaikan indikator program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Beberapa program prioritas yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi. Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja sekaligus sebagai media evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Pamatang Raya, Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,

**Roganda Sihombing, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741202 199503 1 001**



**RAPAT TENTANG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP BERSAMA
INSPEKTUR, SEKRETARIS, IRBAN DAN SELURUH ASSESOR KAPABILITAS APIP**



Inspektorat Kabupaten Simalungun.





Inspektorat Kabupaten Simalungun.



PENINGKATAN KAPABILITAS APIP MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Inspektorat Kabupaten Simalungun.

SOSIALISASI MANAJEMEN RESIKO (MR)





Inspektorat Kabupaten Simalungun.